

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Hal ini terlihat dari keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat majemuk baik dari segi suku, agama, ras maupun kelompok-kelompok sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Heterogenitas dalam masyarakat itu memberikan warna tersendiri dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Perbedaan dalam dimensi kehidupan sosial tersebut merupakan entitas kebangsaan yang patut dibanggakan karena merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa di negara lain. Kebhinekaan itu dapat menciptakan integrasi nasional apabila dikelola dan dipelihara secara baik meskipun di satu sisi konsekuensi logis yang harus diterima dari negara kesatuan atas kebangsaan yang heterogen adalah resiko terpolarisasi dan ancaman timbulnya disintegrasi.

Kemajemukan dalam masyarakat Indonesia ini diungkapkan oleh seorang ahli politik barat, Clifford Geertz mengatakan bahwa Indonesia ini sedemikian kompleksnya sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Geertz mengatakan bahwa:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Will Kymlicka, *Kewarganegaraan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hal. 4.

“Negeri ini bukan hanya multi etnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali dan seterusnya), melainkan juga menjadi arena pengaruh multi mental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya). Indonesia adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.”

Pernyataan Geertz di atas mempertegas bahwa Indonesia jelas adalah sebuah negeri multikultural. Keberagaman masyarakat Indonesia itu tercermin dari adanya kelompok hidup masyarakat yang memiliki kesamaan budaya atas nama suku, kesamaan keyakinan-keyakinan atas nama agama, kesamaan unsur-unsur biologis dalam kesatuan ras dan kesamaan-kesamaan lain yang menjadi identitas kelompoknya. Persamaan dan perbedaan dalam masyarakat itu kemudian terakumulasi menjadi suatu simbol persatuan dan kesatuan yang terbingkai dalam kerangka *Bhineka Tunggal Ika*. Kebhinekaan dalam masyarakat itu memuat suatu idealitas multikulturalisme. Artinya bahwa pengakuan dan penerimaan terhadap segala bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat yang majemuk dan heterogen merupakan suatu keniscayaan yang mutlak dibenarkan.

Pendapat tentang masyarakat Indonesia yang multikultural tersebut juga didasarkan atas fakta real dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 17.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut

agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan.<sup>2</sup>

Heterogenitas komposisi masyarakat Indonesia tersebut apabila dilihat dari cara pandang, tindakan dan wawasan setiap individu yang ada terhadap berbagai macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan terhadap hal-hal lainnya tidak dapat dipungkiri mereka mempunyai pandangan yang sangat beragam. Contohnya masyarakat kita dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda seperti pendidikan, etnis, agama, kelas sosial dan ekonomi mempunyai tindakan dan pandangan yang berbeda-beda pula tentang berbagai macam fenomena sosial. Fenomena sosial seperti ini tidak terlepas dari suatu fakta bahwa keberagaman masyarakat memang terbangun secara sosio-kultural yang kemudian membentuk suatu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan kultur yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Karakteristik kultur tersebut memiliki perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Hal ini terjadi karena kultur adalah sebuah model. Artinya kultur bukan sekumpulan adat istiadat dan kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Kultur adalah suatu yang disatukan dan sistem-sistem yang tersusun dengan jelas. Adat istiadat, institusi, kepercayaan dan nilai-nilai adalah sesuatu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya (Conrad P. Kottak: 1989). Pernyataan ini memperjelas bahwa pluralitas dalam masyarakat itu terbentuk karena faktor kesamaan dari karakteristik kultur yang dianut oleh kelompok masyarakat itu sendiri.

---

<sup>2</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/NKRI>, diakses pada tanggal 15 Januari 2013 pukul 21.35

Pemahaman lain mengenai kultur tersebut juga diungkapkan oleh Conrad P. Kottak bahwa:<sup>3</sup>

“Kultur adalah sebuah simbol. Dalam hal ini simbol dapat berbentuk sesuatu yang verbal dan non-verbal, dapat juga berbentuk bahasa khusus yang hanya dapat diartikan secara khusus pula atau bahkan tidak dapat diartikan ataupun dijelaskan.”

Conrad menjelaskan bahwa dalam sebuah kultur masyarakat itu memiliki suatu nilai tertentu yang menjadi ciri dan karakter yang telah melekat, dimana ciri dan karakter itu kemudian menjadi tanda khusus yang direfleksikan menjadi simbol-simbol kultur tersebut. Simbol ini dapat berupa sesuatu yang verbal dan non-verbal atau melalui bahasa khusus yang kemungkinan bisa diartikan secara khusus pula. Bahkan tidak menutup kemungkinan simbol tersebut tidak dapat diartikan atau dijelaskan sama sekali. Setiap simbol yang melekat dari masing-masing kultur itu merupakan tanda yang mewakili dari kelompok mana kultur itu berasal.

Penjelasan mengenai simbol-simbol yang melekat dalam kultur tersebut mengisyaratkan bahwa setiap manusia memiliki kultur dan mereka hidup dalam kultur mereka sendiri-sendiri. Dengan adanya persamaan simbol yang dimiliki setiap manusia kemudian itu membentuk suatu kelompok-kelompok yang dapat divariasikan menjadi beragam seperti suku, agama, ras, etnis, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang ada di masyarakat multikultural. Setiap kelompok manusia itu memiliki ikatan hidup yang menjadi perilakunya dalam setiap segi kehidupan. Ikatan-ikatan dalam kelompok masyarakat ini secara masif dapat

---

<sup>3</sup> M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultur*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 7.

menjadi bentuk-bentuk primordial di kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Clifford Geertz sendiri bahwa:<sup>4</sup>

“Sesuatu yang berakar pada hal-hal yang selalu ada (*givens*) dalam kedirian masyarakat yakni rasa kesamaan terutama hubungan kekerabatan, tetapi lebih dari itu hal-hal yang bersumber dari lahirnya seseorang dalam komunitas keagamaan tertentu berbicara dalam satu bahasa (misalnya bahasa daerah) dan menaati praktek-praktek sosial, kesamaan pertalian darah, cara berperilaku (norma), sopan santun dan tata krama, adat kebiasaan dan lain-lain. Dianggap mengandung kekuatan memaksa yang muncul dari dalam diri seseorang karena keberadaannya memiliki dorongan yang kuat dan tidak dapat dihindari.”

Geertz mempertegas bahwa primordial dianggap mengandung kekuatan memaksa yang muncul dari dalam diri seseorang karena keberadaannya memiliki dorongan yang kuat dan tidak dapat dihindari. Artinya primordial dalam konsepsinya lebih mengarahkan pada keterikatan yang pasti muncul pada seseorang apabila ia berada dalam lingkungan masyarakat yang memiliki persamaan suku, etnis atau keagamaan atau persamaan keyakinan-keyakinan tertentu. Dengan kata lain keberadaan primordial itu dapat dikatakan muncul secara alamiah seiring dengan perkembangan sosio-kultural di masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini Charles F. Andrean memberikan argumentasi yang selaras dengan Clifford Geertz. Charles F. Andrean berpendapat bahwa:<sup>5</sup>

“Nilai-nilai primordial menunjukkan keterikatan tingkat pertama yang didasarkan pada hubungan biologis (genetik) dan tempat. Orang-orang yang dikaitkan satu sama lain melalui ikatan famili dan etnisitas etnis yang lebih meluas sering memandang adanya suatu solidaritas yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan bersama mengenai sejarah asal-usul mereka dan gaya hidup saat ini. Demikian pula dengan mereka yang berbicara dengan bahasa yang sama. Hidup di daerah geografis yang sama atau

---

<sup>4</sup> Awan Mutakin, et.al., *Dinamika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: PT Genesindo, 2004), hal. 271.

<sup>5</sup> Charles F Andrean, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), hal. 82.

memperlihatkan suatu penghormatan mendalam terhadap daerah tersebut juga menganut identitas bersama.

Senada dengan Clifford Geertz, Charles F. Andrean mengkonsepsikan primordial dalam sudut pandang yang tidak jauh berbeda namun beliau mempunyai pandangan bahwa primordial tersebut didasarkan oleh keterikatan yang berdasarkan pada hubungan biologis (genetik) dan tempat. Menurutnya solidaritas yang berkembang di masyarakat yang ada sangatlah dipengaruhi oleh persamaan keyakinan-keyakinan. Pandangan primordialisme menurut Charles F. Andrean ini akhirnya memperjelas kembali bagaimana primordialisme dapat menjadi identitas bersama bagi sebagian kelompok di masyarakat.

Ikatan-ikatan dalam masyarakat merupakan masalah yang peka. Para warga dari masyarakat yang relatif non-modern sering kali menelusuri garis keturunan mereka kepada leluhur yang sama. Mereka juga memberikan nilai yang tinggi untuk mempertahankan ikatan-ikatan terhadap keluarga besar (suami, istri, anak dan sanak keluarga). Ikatan-ikatan famili, etnis, bahasa dan daerah yang kuat ini sering bertentangan dengan usaha-usaha untuk menegakkan suatu identitas bersama dengan wilayah nasional. Jika pada masa lalu identitas politik bertumpu pada suatu kelompok etnis tunggal namun dewasa ini kebanyakan wilayah nasional meliputi banyak kelompok etnis tidak hanya satu. Maka nasionalisme “wilayah” bertentangan dengan nasionalisme “etnis” ketidakstabilan politik yang luas dapat juga terjadi.

Pilkada langsung yang digelar di berbagai daerah merupakan semangat dan langkah konkrit untuk menyelenggarakan tonggaknya demokrasi di daerah.

Tonggak ini merupakan kelanjutan dari proses pemantapan demokrasi yang sejatinya telah dibangun dalam skala nasional melalui pelaksanaan pemilu ditahun-tahun sebelumnya. Pilkada langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang juga dilakukan secara langsung. Hanya saja aturan yang mengaturnya berbeda. Pilpres berdasarkan pada Undang-Undang tentang pemilu sedangkan pilkada langsung berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Secara substansial pilkada yang diselenggarakan di ranah lokal tidak otomatis lebih mudah dari pada agenda-agenda pesta demokrasi yang telah lalu. Berbagai bentuk dan praktik kerawanan terhadap potensi konflik terus membayangi pelaksanaan pilkada karena berbagai sebab dan alasan, terutama yang berkaitan dengan tingginya potensi konflik atau kekerasan politik dalam pilkada. Hal yang paling *centre* adalah wacana mengenai etnisitas, isu-isu kedaerahan secara simbolis dan rasa sentimen dalam pilkada yang mengatasmakan golongan atau kelompok semakin digaugkan. Masyarakat berada dalam posisi konsumtif yang dieksploitasi dengan membuka latar belakang, sejarah dan semakin mengerucut ke arah identitasnya. Disinilah ruang bagi hadirnya praktik kampanye yang bertumpukan pada isu-isu etnisitas, betapapun hal itu sulit dihindari.

Penguatan sentimen ini dalam batas-batas tertentu bermakna positif, misalnya untuk menguatkan ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat yang selama ini semakin terdegradasi karena terkikis oleh arus modernisme dan budaya materialisme. Namun disatu sisi berbagai bentuk sentimen yang melekat dalam alam sadar

bawah manusia itu mudah sekali dibangkitkan atau ditumbuhkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan. Oleh karena itu mereka yang merasa terikat dalam ikatan tertentu mudah sekali digerakkan atau dimobilisasi untuk tujuan politik seperti pilkada. Apalagi jika pelaksanaan pilkada itu dimaknai sebagai suatu ancaman terhadap kepentingan dan eksistensi kelompok tertentu.

Dalam praktik primordial tersebut bangsa ini pun kembali tersentak dengan munculnya gerakan kedaerahan dengan mengambil *setting* politik etnisitas yang merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkan, disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas kian banyak dipakai oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi. Menguatnya politik identitas di ranah lokal ini bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam *power-sharing*. Hal ini menunjukkan secara nyata betapa ampuhnya politik ini digunakan oleh aktor-aktor politik ketika berhadapan dengan entitas politik lain.

Menguatnya isu etnisitas dalam pelaksanaan pilkada ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan pemaknaan etnis itu sendiri yang direpresentasikan sebagai identitas seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat<sup>6</sup> etnis adalah kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut,

---

<sup>6</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hal. 9-10.

adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Setiap orang pasti akan mengatakan bahwa latar belakang etnis yang dimilikinya merupakan identitas dari mana orang tersebut dan berasal.

Penggunaan politik etnis dalam perjuangan politik saat ini masih banyak terjadi hampir disetiap pergelaran kompetisi politik seperti pemilihan kepala daerah. Etnis dijadikan salah satu sarana untuk berkampanye dan menarik simpati masyarakat terutama yang berasal dari etnis tertentu. Isu mengenai etnisitas masih sering menjadi bahan jualan ketika melakukan kampanye politik. Hal ini tidak terlepas dari kultur masyarakat yang mejemuk dan memelihara ikatan kekerabatannya masing-masing. Akan sangat sering menemui perkumpulan-perkumpulan antar etnis yang berdasarkan kedekatan etnis melakukan dukungan secara massal terhadap calon yang ikut dalam kompetisi politik.

Kemunculan politik etnis diawali oleh tumbuhnya kesadaran yang mengidentikkan mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu. Dalam momentum pilkada para calon menggunakan identitas sosialnya (etnis) untuk dipresentasikan bahwa sebenarnya ia ingin menunjukkan kepada masyarakat yang memiliki kesamaan etnis dengannya untuk membangun eksistensi kelompok etnisnya tersebut. Masyarakat pun menyambut usaha dari para calon itu dengan memberikan kepercayaannya bahwa harus ada wakil dari kelompoknya untuk menduduki jabatan kekuasaan. Rasa kebanggaan tersendiri apabila memiliki pemimpin yang berasal dari golongannya.

Politik etnis sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik (pilkada) yang dilakukan oleh para elit lokal ternyata dikemas dalam bentuk yang variatif, rapi dan elegan namun tetap menciderai nilai demokrasi. Pertama, politik etnis dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka pemekaran wilayah seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tidak luput juga di Provinsi Lampung. Kedua, politik etnis yang dicoba untuk ditransformasi ke dalam entitas politik dengan harapan bisa menguasai pemerintahan daerah sampai pergantian pimpinan puncak. Praktik semacam ini yang diterjemahkan oleh masyarakat sebagai nepotisme yang mengakibatkan kecemburuan masyarakat begitu tajam dalam tubuh birokrasi.

Ketiga, politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara “kami dan mereka”, “saya dan kamu” sampai pada bentuknya yang ekstrim “jawa’ dan “luar jawa”, hingga “islam dan kristen”. Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh atau pun rival politiknya yang *notabene* “kaum pendatang”. Penelitian ini lebih mengkaji manifestasi politik etnis yang digunakan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat mengarahkan dan menentukan pilihan politik masyarakat melalui perasaan masyarakat terhadap sang calon tersebut. Identitas etnis yang direpresentasikan dalam proses politik dilakukan oleh sang calon guna memberikan pemahaman kepada masyarakat jika dirinya memiliki kesamaan dan merupakan bagian dari kelompok sosial di masyarakat.

Dalam hal ini sang calon yang menggunakan identitas etnisnya secara simbolis, baik dalam perilaku hidup maupun aktivitasnya secara visual agar orang lain

memiliki kejelasan tentang siapakah diri kita sebenarnya. Artinya melalui simbol-simbol etnis itulah kemudian masyarakat dapat mengidentifikasi sang calon dan mendefinisikan bahwa “bagaimana saya berbeda dengan sang calon” dan dari sinilah dapat diketahui “apakah kita sama dengan sang calon”. Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik.

Kesadaran bahwa pilkada merupakan instrumen untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik lokal adalah perihal yang menjadi suatu keharusan. Karena instrumen tersebut merupakan penegakan kedaulatan rakyat di ranah lokal yang berimplikasi terhadap internalisasi nilai-nilai *good governance* dalam pemerintah daerah. Masyarakat mendapat posisi strategis dan vital dalam proses penentuan elit-elit yang akan duduk dalam agenda suksesi kepemimpinan elit di daerah. Hampir di setiap daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung mengadakan pilkada termasuk salah satunya adalah kabupaten Tulang Bawang.

**Tabel 1. Perolehan Suara Sah Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012**

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Etnis Calon	Persentase Perolehan Suara
1.	Ismet Roni-Solihah (Iso)	Lampung - Jawa	30,05 %
2.	Hanan-Heri Wardoyo (Handoyo)	Lampung - Jawa	62, 39 %
3.	Marzuki-Nasrollah (Mana)	Lampung - Jawa	7,56 %
<b>Total Suara</b>			<b>100 %</b>

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki keragaman secara rasio kultural tentunya mempunyai warna tersendiri dalam perilaku politik pemilihnya apalagi Kabupaten Tulang Bawang memiliki karakteristik masyarakat yang bersifat heterogen dan penyebaran penduduknya didominasi etnis-etnis tertentu. Karena pilkada langsung dihadapkan atau tidak terlepas oleh permasalahan yang bersentuhan dengan ikatan-ikatan dalam masyarakat seperti isu-isu etnisitas. Walaupun keberadaan ikatan-ikatan tersebut merupakan suatu realitas sosial yang tidak bisa dihindari. Maka penggunaan ikatan etnis dalam preferensi politik sejatinya merupakan sesuatu hal-hal yang sah-sah saja.

Namun penggunaan ikatan ini hendaknya juga ditempatkan secara proporsional. Karena pemilih harus tetap mengedepankan sisi dari kualitas serta kapabilitas dari calon pemimpin yang akan dipilih. Walaupun di sisi lainnya ikatan etnis juga turut menentukan dalam konteks melakukan pertimbangan. Namun apabila sisi dari kualitas dan kapabilitas tidak diutamakan maka dapat dikatakan bahwa sentimen etnis muncul ketika masyarakat pemilih sudah tidak bisa menggunakan rasionalitasnya dalam melakukan pilihan politik.

Politik etnis yang digunakan oleh para elit lokal pada saat momentum pilkada berbentuk pemunculan identitas etnis secara simbolis dengan mengangkat budaya asli yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh ketika calon tersebut berusaha memperkenalkan diri kepada masyarakat melalui media kampanye seperti poster, baliho (reklame), spanduk, kalender dan lainnya, foto yang mereka pasang menggunakan pakaian adat masing-masing yang jelas mengatasnamakan sukunya. Banyak atribut-atribut kesukuan bahkan yang lebih ekstrim menyentuh

ranah agama yang sengaja dimunculkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah suku tertentu, kelompok tertentu, dan dengan harapan jika masyarakat yang memiliki kesamaan dengan suku atau kelompoknya dapat memberikan suara dan dukungannya pada saat pilkada.

Tidak jarang para pasangan bupati dan wakil bupati menggunakan slogan-slogan tertentu yang bermuatan etnisitas dengan memunculkan bahasa daerah masing-masing suku tersebut untuk mencirikan kelompok masyarakat tertentu. Para kandidat mengusung latar belakang atau asal-usul daerahnya melalui suku tertentu yang melekat pada dirinya dengan tujuan memberikan pendekatan emosional terhadap masyarakat sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa klaim atas identitas calon tersebut merupakan bagian identitas masyarakat.

Penggunaan bahasa daerah yang dipakai sebagai slogan calon itu mengandung unsur persuasif yang secara tidak langsung menghegemoni masyarakat dalam berpikir sehingga berimplikasi terhadap perasaan masyarakat kepada sang calon untuk menyukai calon tersebut karena kedekatan emosional. Kalimat seperti *“piye-piye penak wonge dewe”* dalam bahasa jawa (bagaimanapun juga lebih enak orang kita sendiri), dan kalimat penegasan yang identik dengan budaya lampung *“amun mak gham sapa lagi, amun mak ganta kemedala lagi”*, (kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi) adalah beberapa bahasa kampanye yang dinilai efektif untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Momentum kampanye sangat dimanfaatkan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara pendekatan kepada masyarakat. Komunikasi dan dialog yang dilakukan oleh para calon juga mengandung muatan

etnisitas dengan atribut kedaerahan. Terdapat istilah sapaan yang biasa digunakan untuk memunculkan identitas diri. Sebutan “*Mas*” untuk orang Jawa dan “*Kyai*” sebagai orang Lampung memberikan batas-batas kesukuan yang dapat membagi masyarakat ke dalam segmentasi politik.

Dalam konteks ini mencuatnya isu etnisitas dalam pilkada Kabupaten Tulang Bawang tampaknya dimanfaatkan dengan serius oleh para kandidat calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan langsung yang disampaikan oleh wakil bupati terpilih yakni Heri Wardoyo pada saat memberikan kuliah umum Mata Kuliah Politik dan Media Massa pada tanggal 3 Desember 2012, dimana Heri Wardoyo memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Saya bukan orang Tulang Bawang dan saya sebelumnya jarang sekali ke Tulang Bawang. Mungkin hanya beberapa, dua atau tiga kali saya ke Tulang Bawang...Nama saya Heri War-do-yo. Ada dua huruf “O” nya, dan di Tulang Bawang penduduknya mayoritas Jawa.”

Pernyataan Heri Wardoyo tersebut mengindikasikan bahwa ada semacam pemunculan identitas diri dengan menggunakan simbol-simbol yang mengatasnamakan etnis ataupun kesukuan. Hal ini merupakan suatu tanda bahwa terdapat suatu upaya yang dilakukan oleh Heri Wardoyo untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa terdapat kesamaan identitas dirinya (*selfness*) dengan kelompok masyarakat yang diasumsikan itu bagian dari dirinya. Disini terlihat bahwa etnis telah menjadi suatu identitas yang kemudian direpresentasikan ke dalam usaha-usaha politik guna menjadikannya sebagai komoditas suara.

Etnis yang direpresentasikan sebagai identitas seorang kandidat. Dimana identitas tersebut diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki atau berbagai kesamaan dengan orang lain dan pada saat yang bersamaan juga identitas diformulasikan oleh keberbedaan (*otherness*) atau sesuatu yang di luar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*).

Rasa kepemilikan terhadap kesamaan-kesamaan tersebut secara kolektifitas mewujudkan kelompok yang mengatasnamakan “kita” (*in grup*) sedangkan sesuatu yang di luar persamaan sebagai kategori pembeda itu membentuk konsep “mereka” (*out grup*). Melalui rasa persamaan tersebut (etnis Jawa) ingin ditunjukkan bahwa siapa sajakah yang merupakan bagian atau kelompok “saya” (calon). Sedangkan dengan adanya keberbedaan tersebut ingin menunjukkan bahwa “mereka” bukan bagian dari kita. Sehingga nantinya membentuk kesadaran perilaku masyarakat untuk berikatan berdasarkan kelompoknya.

Secara sosio kultural masyarakat Kabupaten Tulang Bawang memiliki tingkat kemajemukan baik itu dilihat dari suku/etnis yang berdomisili maupun secara kultural dari masyarakat etnis lokal (pribumi) itu sendiri. Bersumber pada komposisi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang, dimana kita bisa temukan pada data yang ada tersebut memperlihatkan secara jelas akan tingkat kemajemukan masyarakat yang ada.

**Tabel 2. Perbandingan Jumlah Penduduk Pendetang dan Penduduk Asli Kabupaten Tulang Bawang per Kecamatan Tahun 2012**

No.	Kecamatan	Suku Pendetang	Suku Lampung	Jumlah Penduduk	% Suku Pendetang	% Suku Lampung
1.	Banjar Agung	29.455	2.332	31.787	92,66 %	7,34 %
2.	Banjar Margo	27.030	2.426	29.456	91,76 %	8,24 %
3.	Gedung Aji	10.624	1.621	12.245	86,76 %	13,24 %
4.	Penawar Aji	16.441	2.234	18.675	88,04 %	11,96 %
5.	Meraksa Aji	13.014	1.560	14.574	89,30 %	10,70 %
6.	Menggala	9.991	25.352	35.343	28,27 %	71,73 %
7.	Penawar Tama	24.473	2.877	27.350	89,48 %	10,52 %
8.	Rawajitu Selatan	19.474	8.989	28.463	68,42 %	31,58 %
9.	Gedung Meneng	25.490	2.087	27.577	92,43 %	7,57 %
10.	Rawajitu Timur	22.751	9.005	31.756	71,64 %	28,36 %
11.	Rawa Pitu	7.659	8.684	16.343	46,40 %	53,60 %
12.	Gedung Aji Baru	16.892	3.342	20.234	83,48 %	16,52 %
13.	Dente Teladas	39.898	7.313	47.211	84,51 %	15,49 %
14.	Banjar Baru	6.699	6.425	13.124	51,04 %	48,96 %
15.	Menggala Timur	7.281	14.043	21.324	34,14 %	65,86 %
<b>JUMLAH</b>		<b>277.172</b>	<b>98.290</b>	<b>375.462</b>	<b>73,82 %</b>	<b>26,18 %</b>

Sumber: Arsipasi Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Menggala

Melihat komposisi penduduk Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan sensus di atas, dimana persebaran penduduk pendatang menjadi mayoritas di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Maka tidaklah mengherankan apabila masing-masing tim pemenangan pilkada Kabupaten Tulang Bawang menggunakan komoditas politik etnis dalam upaya memenangkan suara. Hal demikian akan sangat dimungkinkan bisa terjadi disebabkan oleh keragaman etnis atau suku. Keragaman suku ini tentunya mempengaruhi pula dari cara pandang, tindakan dan wawasan setiap individu yang ada terhadap berbagai macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan terhadap hal-hal lainnya.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Suku Bangsa Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012**

No.	Kecamatan	Jumlah	Suku Bangsa Warga Negara Indonesia				
			Lampung	Jawa	Sunda	Batak	Bali
1.	Banjar Agung	31.787	2.332	26.914	1.243	36	1.262
2.	Banjar Margo	29.456	2.426	24.429	1.131	213	1.257
3.	Gedung Aji	12.245	1.621	7.427	1.087	345	1.765
4.	Penawar Aji	18.675	2.234	13.127	1.546	222	1.546
5.	Meraksa Aji	14.574	1.560	9.585	1.767	322	1.340
6.	Menggala	35.343	25.352	2.830	1.628	251	5.282
7.	Penawar Tama	27.350	2.877	21.828	1.422	125	1.098
8.	Rawajitu Selatan	28.463	8.989	16.556	1.121	764	1.033
9.	Gedung Meneng	27.577	2.087	22.026	1.110	342	2.012
10.	Rawajitu Timur	31.756	9.005	18.306	2.886	525	1.034
11.	Rawa Pitu	16.343	8.684	4.518	1.563	236	1.342
12.	Gedung Aji Baru	20.234	3.342	12.741	2.231	343	1.577
13.	Dente Teladas	47.211	7.313	36.335	1.120	210	2.233
14.	Banjar Baru	13.124	6.425	3.053	1.875	198	1.573
15.	Menggala Timur	21.324	14.043	1.643	1.976	425	3.237
<b>JUMLAH</b>		<b>375.462</b>	<b>98.290</b>	<b>221.318</b>	<b>23.706</b>	<b>4.557</b>	<b>27.591</b>

Sumber: Arsipasi Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Menggala

Berdasarkan hasil sensus di atas dapat dilihat bagaimana penyebaran suku atau etnis di setiap masing-masing wilayah. Heterogenitas masyarakat tersebut secara otomatis dapat memperlihatkan basis konstituen serta bagaimana melihat kecenderungan masyarakat untuk memilih berdasarkan komposisi etnis kandidat yang diusung. Maka upaya untuk mempercepat adanya sentimen etnis sangat besar kemungkinan terjadi. Setiap kelompok masyarakat ingin menunjukkan pengaruh bahkan dalam lobi-lobi politik. Rasa kesukuan merupakan senjata ampuh dalam strategi mendapatkan simpati.

Semua proses di atas secara tidak langsung dapat membagi masyarakat berdasarkan segmentasi etnis sehingga hal tersebut memungkinkan untuk menggiring ke arah mana preferensi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah langsung Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012 diberikan. Karena itu penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut sebuah realita sosial pada heterogenitas masyarakat dalam menentukan preferensi politiknya terkait dengan berkembangnya isu etnisitas dalam pemilihan kepala daerah langsung melalui konsep politik identitas.

Penelitian yang mengangkat tema tentang politik etnis yang merupakan politik identitas sebagai basis gerakannya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya adalah laporan [ibankjenage.wordpress](http://ibankjenage.wordpress.com) yang meneliti tentang Pengaruh Dukungan Pujakesuma Tapanuli Selatan dan Sidimpuan Terhadap Elektabilitas Gus Irawan Pasaribu-Soekirman. Penelitian ini mengangkat pilkada Sumatera Utara dan yang menarik adalah sepak terjang etnis Jawa dalam

memainkan partisipasi politiknya dalam momentum pilkada di Sumatera Utara tersebut.

Etnis Jawa melalui paguyuban mereka menjadi rebutan para kandidat pada saat kampanye karena etnis Jawa memiliki basis massa yang sangat besar dan terkenal loyal terhadap arahan yang diberikan atasan. Ada beberapa kandidat yang berasal dari etnis Jawa yang sesungguhnya tidak otomatis langsung mendapat dukungan penuh dari sesama warga Jawa. Perebutan dukungan ini dianalisis ketika sudah mendapat hasil final elektabilitas kandidat, yakni kandidat yang benar-benar didukung oleh paguyuban Jawa.

Dalam penelitian ini Tapanuli Selatan dan Sidempuan atau Wilayah Tapanuli Bagian Selatan, Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakesuma menyatakan dukungannya kepada pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman. Dalam menjatuhkan dukungan secara massif ini dapat dianalisis dengan berbagai perspektif dalam ilmu politik, dan bisa juga dikaitkan dengan disiplin ilmu lain seperti Antropologi yang menekankan pada pendekatan kebudayaan atau kekerabatan. Karena sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa kultur masyarakat Sumut dalam pilkada masih dipengaruhi kuat oleh latar belakang primordial (etnis dan agama).

Di Tapanuli Selatan dan Sidempuan terbukti calon yang didukung oleh Paguyuban Pujakesuma Tapanuli Selatan dan Sidempuan dapat memenangi pilkada. Pasangan Gus-Man sebagai kampiun disegi elektabilitas di Tapanuli Selatan dan Sidempuan ini membuktikan bahwa budaya politik masyarakat yang berorientasi pada sistem serta individu. Masyarakat etnis Jawa yang ada di Tapanuli Selatan dan

Sidimpuan memilih berdasarkan sistem yang mengatur mereka di paguyuban, karena mereka terikat secara kekerabatan, secara budaya, dan secara moral untuk memilih calon yang sudah ditetapkan untuk didukung oleh paguyuban.

Suatu hal yang menarik dalam perebutan dukungan di Tapanuli Selatan dan Sidimpuan ini adalah sesungguhnya pasangan calon yang didukung penuh oleh paguyuban Pujakesuma Tapanuli Selatan dan Sidimpuan ini bukanlah satu-satunya calon yang berdarah “Jawa”. Soekirman adalah etnis Jawa yang bertindak sebagai wakil, sementara ada kandidat lain yakni Gatot Pujonugroho yang juga berdarah “Jawa” dan bahkan bertindak sebagai calon Gubernur. Menarik dianalisis mengapa pilihan Pujakesuma justru mengarah kepada pasangan Gus-Man dan bukan ke pasangan Gan-Teng. Ini bisa ditilik melalui sisi kedekatan emosional serta historis dari kandidat yang berdarah Jawa ini. Nilai-nilai emosional yang terkandung berarti intensitas kedekatan Soekirman terhadap warga Jawa di sana sangat besar dibandingkan dengan Gatot.

Jika dianalisis penelitian ini merupakan bagian implementasi dari budaya serta partisipasi politik. Masyarakat yang memiliki kesamaan nilai kekulturnya dalam hal ini etnis Jawa lebih mengutamakan kedekatan kekerabatan dan emosional karena lebih mengetahui sifat asli calon pemimpin yang mereka dukung serta yang memiliki sisi “Wong Jawani” yang lebih kental. Kedekatan kekerabatan itu sangat menonjol dan berperan. Dalam masyarakat yang memiliki kultur sangat majemuk seperti ini, maka masing-masing etnis, suku, dan kelompok masyarakat lainnya ingin menempatkan wakil mereka masing-masing di pemerintahan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin majemuknya masyarakat dengan heterogenitas suku/etnis di dalamnya. Maka kondisi tersebut dapat saja dimanfaatkan oleh komoditas politik yang berkompetisi untuk menggunakannya sebagai alat untuk mencapai kemenangan. Modal dukungan dari segmen emosional dan etnis merupakan suatu hal yang justru menjadi garapan oleh tiap-tiap kandidat yang bersaing dalam pilkada. Bagaimana memanfaatkan kelompok-kelompok tersebut yang tentunya sangat efektif dalam mempercepat isu etnisitas dalam pilkada. Secara sosio-kultural masyarakat Kabupaten Tulang Bawang memiliki tingkat kemajemukan baik itu dilihat dari suku/etnis yang berdomisili maupun secara kultural dari masyarakat etnis lokal (pribumi) itu sendiri.

## **B. Perumusan Masalah**

Wacana mengenai berkembangnya isu etnisitas dalam pilkada langsung tentunya menjadi fenomena politik yang hendaknya dikaji secara serius oleh penyelenggara pilkada atau masyarakat yang menginginkan perubahan dalam iklim demokrasi saat ini. Identitas etnis telah menjadi sumber daya politik dengan mendesainnya dalam politik identitas. Penggunaan simbol-simbol yang mencerminkan identitas tertentu dalam agenda politik seperti ini akan memperlihatkan secara jelas bahwa identitas dapat menandai suatu kelompok terhadap kelompok lain di dalam suatu pembedaan (*otherness*). Pada akhirnya identitas seseorang mengkonstruksikan batasan-batasan apa saja mengenai dirinya dan apa saja yang membuatnya sama atau berbeda dengan orang lain. Kondisi yang membuat seseorang memiliki atau berbagai kesamaan (*sense of belonging*) dengan orang lain dan sesuatu yang diluar persamaan-pesamaan tersebut membentuk ikatan kolektif. Ikatan-ikatan dalam

kelompok seperti ini cenderung akan berimplikasi terhadap kecenderungannya untuk mengedepankan eksistensi kelompoknya. Dalam konteks pilkada usaha-usaha untuk mengeksistensikan identitas dan kelompoknya tersebut tercermin melalui preferensi masyarakat dalam kecenderungan berpolitiknya. Berdasarkan pemaparan di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah manifestasi identitas politik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses manifestasi identitas politik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian khusus yang berkaitan dengan konsep politik identitas yang memberikan penelaahan secara teoritik mekanisme politik pengorganisasian identitas sebagai sumberdaya dan sarana politik. Di dalamnya akan terkandung analisa teori yang memberikan telaah studi untuk memperkaya wawasan mengenai ilmu politik identitas.

Hasil penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan dan diketahui:

- a. Dinamika politik lokal khususnya di Kabupaten Tulang Bawang sehingga dapat memberikan analisis kekuatan politik sebagai kajian studi bagi pengembangan demokrasi di daerah.
- b. Pendidikan nasionalisme sebagai manajemen konflik dan pengaturan konsensus untuk mencapai integrasi dan ketahanan nasional.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aktivis dan aktor politik, pemerintah, partai politik dan masyarakat luas dalam memahami dan mengkaji serta menggunakan politik etnisitas untuk diletakkan pada proporsi yang seharusnya dan sewajarnya disetiap momen politik suksesi kepemimpinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menciptakan pemilihan kepala daerah yang bermutu baik dari kualitas maupun kuantitas dalam memaksimalkan fungsi pendidikan politik.